

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA *FRAUDULENT FINANCIAL* *REPORTING*

(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2020-2022)

Moh. Wahyu Imam Saputra, Mutiara Tresna Parasetya¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

A financial report which reflects the condition and performance of the company, is used as a means of communication and a basis for decision making for stakeholders. However, management often carries out fraudulent financial reporting, resulting in information asymmetry and allowing agency problems to occur. Therefore, an effective monitoring system is needed, one of which is through the implementation of corporate governance.

The independence of the board of commissioners, remuneration of the board of commissioners, financial expertise of the main director, financial expertise of the board of commissioners, frequency of board of commissioners meetings, and managerial ownership are used to see the influence of corporate governance on the possibility of fraudulent financial reporting. A total of 261 research samples will be observed using a binary logistic regression model. Based on the empirical evidence obtained, the frequency of board of commissioners meetings are proven to have a negative influence on the possibility of fraudulent financial reporting. Meanwhile, the independence of the board of commissioners, remuneration of the board of commissioners, financial expertise of the CEO, financial expertise of the board of commissioners, and managerial ownership do not have a significant influence on the possibility of fraudulent financial reporting.

Considering the research results obtained, it is appropriate for companies to implement good corporate governance. Through the implementation of good corporate governance, it will indirectly increase company value in the long term. This is because stakeholders feel confident that the company's financial reports have been prepared fairly and accountably.

Keywords: Corporate Governance, Fraudulent Financial Reporting, Agency Problem, Information Asymmetry

PENDAHULUAN

Kondisi dan kinerja suatu organisasi tak terkecuali perusahaan, tercermin dalam laporan keuangan yang disusun setiap akhir periodenya. Mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Tahun 2022 tentang penyajian laporan keuangan, laporan keuangan yang disajikan secara sistematis mencerminkan posisi serta kinerja keuangan sebuah entitas. Laporan keuangan ini sendiri menjadi sarana komunikasi bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti pemegang saham, manajemen dan karyawan selaku pihak internal, serta debitur, kreditur, *supplier*, investor, *customer*, dan pemerintah selaku pihak eksternal (Selly & Cherrya, 2021). Sebagai sarana komunikasi, sudah sepatutnya laporan keuangan disusun secara jujur, wajar, serta terbebas dari manipulasi, mengingat laporan keuangan ini merupakan dasar bagi pengambilan keputusan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Namun realitanya, masih banyak entitas yang melakukan rekayasa pada laporan keuangan milik mereka atau dengan kata lain, entitas tersebut telah melakukan fraud laporan keuangan. Fraud dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan jika dilakukan secara sengaja demi keuntungan pribadi pelaku. Sementara menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Audit (SA)

¹ Corresponding author

240 tentang tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan, tindakan disengaja yang bertujuan untuk mencapai suatu keuntungan dengan penggunaan tipu muslihat serta melanggar regulasi oleh suatu individu maupun pihak terkait dapat dikatakan sebagai kecurangan atau fraud. Dalam laporan *Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations* yang dirilis oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), fraud yang dilakukan sebuah entitas terbagi menjadi fraud laporan keuangan, korupsi, dan penyalahgunaan aset.

Jika praktik seperti itu dibiarkan terjadi, akan memunculkan asimetri informasi yang tentunya dapat merugikan *stakeholder* serta memungkinkan terjadinya konflik keagenan. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan perusahaan diperlukan adanya suatu sistem pengawasan yang efektif. Sistem pengawasan yang dapat diterapkan oleh perusahaan salah satunya melalui implementasi tata kelola perusahaan melalui peran direksi serta dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab serta tugas yang berbeda namun saling bersinergi. Seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana direksi bertugas untuk mengambil segala keputusan terkait operasional perusahaan dan dewan komisaris mengawasi tugas direksi serta aktivitas operasional perusahaan. Kedua organ perusahaan ini saling bersinergi untuk memastikan proses pelaporan keuangan perusahaan terbebas dari fraud akibat konflik kepentingan yang timbul dalam hubungan keagenan.

Guna meningkatkan efektivitas direksi serta dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya, diperlukan adanya keahlian finansial yang dimiliki oleh direktur utama maupun dewan komisaris. Dengan keahlian finansial yang mumpuni, diharapkan baik direktur utama maupun dewan komisaris dapat mendeteksi adanya kegagalan dalam aktivitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Maka dari itu, pengangkatan anggota direksi maupun dewan komisaris perlu mempertimbangkan latar belakang akademis serta pengalaman yang dimiliki agar tata kelola perusahaan dapat dijalankan dengan baik dan potensi terjadinya *fraudulent financial reporting* dapat ditekan. Selain itu, diperlukan pula independensi dalam susunan direksi maupun dewan komisaris guna menunjang proses pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan. Pengangkatan direktur serta komisaris independen membuat keputusan yang ditetapkan bersifat objektif dan tidak dapat dipengaruhi oleh manajemen maupun pemangku kepentingan lainnya. Senada dengan hal tersebut, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 disebutkan bahwa dewan komisaris maupun direksi perlu menjunjung tinggi prinsip independensi (OJK, 2014).

Namun begitu, tidak menutup kemungkinan bagi direksi maupun dewan komisaris untuk terlibat dalam *fraudulent financial reporting* yang dilakukan pihak manajemen. Maka dari itu, pemberian remunerasi dengan jumlah yang layak untuk direksi serta dewan komisaris sangat diperlukan agar direksi maupun dewan komisaris tidak tergiur untuk terlibat dalam *fraudulent financial reporting*. Selaras dengan hal ini, dalam *Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia* (PUGKI) disebutkan bahwa remunerasi berfungsi untuk menyelaraskan antara tujuan jangka panjang perusahaan dengan kepentingan dewan komisaris dan direksi serta penciptaan nilai berkelanjutan (KNKG, 2021). Selain itu, kepemilikan saham oleh direksi maupun dewan komisaris juga mampu mencegah keterlibatan direksi dan dewan komisaris dalam tindakan *fraudulent financial reporting*. Apabila direksi maupun dewan komisaris juga berperan sebagai pemegang saham (*shareholder*), akan meminimalisir adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang mungkin timbul.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Hubungan kontraktual antara prinsipal dengan agen, di mana agen diberi suatu kewenangan untuk menjalankan tindakan yang menguntungkan bagi prinsipal dinamakan sebagai hubungan keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pendelegasian wewenang. Teori ini muncul ketika terjadi suatu pendelegasian wewenang dari prinsipal kepada agen untuk mengelola sumber daya yang ada di dalam suatu entitas. Dalam pengelolaan sumber daya oleh agen, tidak menutup kemungkinan akan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) atau sering disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). Dalam hal ini, manajemen perusahaan selaku agen mengambil keputusan yang hanya menguntungkan bagi

perusahaan dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham (*shareholder*) selaku prinsipal (Alijoyo & Zaini, 2004).

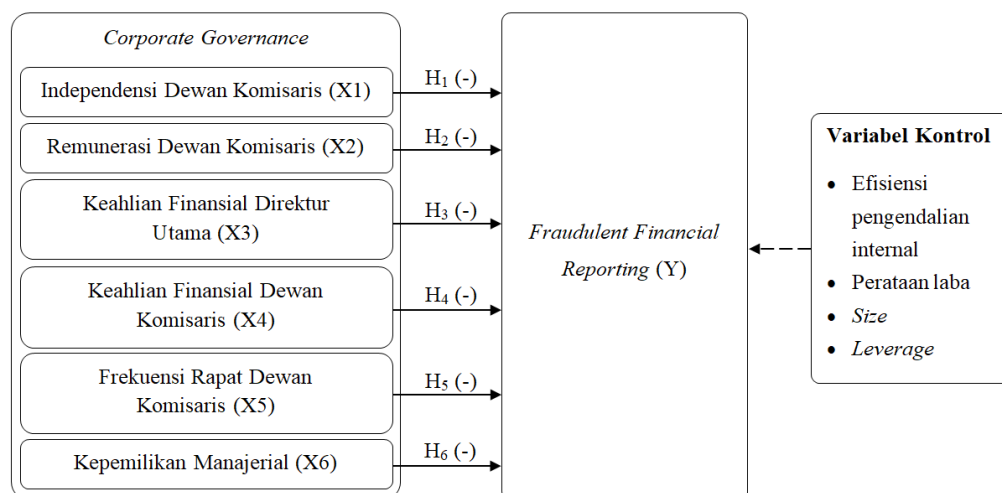
Masalah keagenan seperti itu timbul oleh suatu asimetri informasi (*asymmetric information*), di mana agen tidak memberikan informasi secara lengkap atau bahkan menutup-nutupi suatu informasi demi keuntungan pribadi agen. Hal ini senada dengan pandangan Jensen & Meckling (1976) bahwa agen cenderung mementingkan diri sendiri meski kepentingan tersebut bertolak belakang dengan kepentingan prinsipal. Selain itu, masalah keagenan dapat timbul jika terdapat suatu diskresi maupun masalah pada insentif sehubungan dengan penyelesaian tugas yang dilakukan agen (Godfrey, 2010). Pembentukan skema insentif jangka pendek serta jangka panjang akan menjadi instrumen pengendali agar agen tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal.

Meskipun masalah keagenan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, prinsipal dapat menempuh beberapa jalan untuk meminimalisir resiko yang timbul dari masalah keagenan. Dalam rangka meminimalisir resiko ini, akan timbul biaya keagenan (*agency cost*) yang tak terelakkan bagi prinsipal. Menurut Jensen & Mecklin (1976), suatu biaya yang timbul dalam rangka mengatur serta mengawasi para manajer agar tindakan yang dilakukan oleh mereka tidak bertentangan dengan kepentingan prinsipal disebut sebagai biaya keagenan. Biaya keagenan ini dapat berupa biaya pengawasan (*monitoring cost*) oleh prinsipal maupun biaya pengikatan (*bonding cost*) oleh agen.

Teori Segitiga Fraud

Fraud pelaporan keuangan yang terjadi selain didorong oleh perbedaan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, juga didorong oleh berbagai faktor lain. Faktor lainnya dikemukakan oleh Cressey (1953) dan diberi nama teori segitiga fraud (*fraud triangle theory*). Menurut Cressey (1953), pelaku fraud melakukan tindakannya tersebut dengan didasari oleh adanya tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), serta rasionalisasi (*rationalization*). Melalui teori tersebut dapat dijelaskan mengapa pihak manajemen melakukan tindakan fraud pelaporan keuangan. Pihak manajemen terdorong untuk melakukan fraud dikarenakan adanya suatu tekanan seperti misalnya target penjualan yang belum terpenuhi, ditambah dengan adanya peluang seperti lemahnya pengendalian internal maupun tata kelola perusahaan yang kurang optimal membuat pihak manajemen merasionalisasikan atau membenarkan tindakan mereka untuk memanipulasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Kemungkinan Terjadinya *Fraudulent Financial Reporting*

Indonesia yang menganut sistem 2 dewan dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan, di mana dalam pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan, dewan komisaris memiliki tanggung

jawab serta wewenang yang berbeda dengan direksi namun saling bersinergi. Dari perspektif teori keagenan dapat terlihat bahwa dewan komisaris memiliki peranan penting dalam fungsi pengawasan serta mengendalikan segala keputusan yang diambil oleh direksi agar terhindar dari suatu perilaku oportunistik (Jensen & Meckling, 1976). Perilaku oportunistik tersebut dapat terpicu apabila terdapat suatu celah yang tidak diawasi dengan baik oleh dewan komisaris, sehingga timbul suatu masalah keagenan (*agency problem*). Oleh sebab itu, baik direksi maupun dewan komisaris dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi independensi dalam menjalankan peran serta tanggung jawabnya. Dalam kasus ini, keberadaan komisaris independen diharapkan mampu meminimalisir masalah keagenan (*agency problem*) yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan hubungan agen dan prinsipal. Dalam “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014” disebutkan bahwa independensi dewan komisaris maupun direksi dinilai berdasarkan tidak adanya hubungan afiliasi dengan entitas yang bersangkutan maupun dengan anggota lainnya pada entitas yang bersangkutan.

Rostami & Rezaei (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *fraudulent financial reporting* terpengaruh secara signifikan dan negatif oleh independensi dewan. Dalam penelitian Razali & Arshad (2014) juga menemukan pengaruh negatif dan signifikan atas direktur non-eksekutif terhadap kemungkinan manajemen laba. Ketika tingkat independensi dewan komisaris tinggi, pihak manajemen tidak dapat mempengaruhi keputusan dewan komisaris untuk terlibat dalam tindakan kecurangan pelaporan keuangan perusahaan. Dengan independensi yang dimiliki dewan komisaris turut memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap anggota direksi serta manajemen perusahaan sehingga potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dapat ditekan dan memperkecil potensi *fraudulent financial reporting*. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Independensi dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting*

Pengaruh Remunerasi Dewan Komisaris terhadap Kemungkinan Terjadinya *Fraudulent Financial Reporting*

Berdasarkan teori keagenan, baik pemegang saham selaku prinsipal dan pihak manajemen selaku agen memiliki kepentingannya masing-masing (Jensen & Meckling, 1976). Namun seringkali kepentingan prinsipal memberikan suatu tekanan bagi agen untuk bertindak secara oportunistik demi memenuhi kepentingan prinsipal dan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Tindakan oportunistik ini dapat dicegah melalui pemberian remunerasi yang layak sebagai apresiasi atas kinerja direksi serta dewan komisaris. Pemberian remunerasi kepada direksi maupun dewan komisaris semestinya berorientasi pada pengembangan perusahaan secara berkelanjutan serta mampu mendorong tercapainya tujuan jangka panjang perusahaan. Selain itu, pemberian remunerasi sekiranya dapat mendorong kinerja dewan komisaris dalam melakukan tugas serta tanggung jawabnya, sehingga potensi timbulnya masalah keagenan (*agency problem*) dapat diminimalisir.

Besaran remunerasi yang ditetapkan harus berdasarkan persetujuan pada RUPS dengan mempertimbangkan peran dan tanggung jawab tiap anggota dewan serta kinerja perusahaan. Penetapan batas atas dalam pemberian remunerasi juga diperlukan yang kemudian diungkapkan dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan (KNKG, 2021). Rostami & Rezaei (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa *fraudulent financial reporting* terpengaruh secara negatif dan signifikan oleh pemberian remunerasi dewan. Dengan pemberian remunerasi yang memadai, diharapkan dewan direksi maupun dewan komisaris menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin serta tidak tergoda untuk terlibat dalam *fraudulent financial reporting*. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Remunerasi dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting*

Pengaruh Keahlian Finansial Direktur Utama terhadap Kemungkinan Terjadinya *Fraudulent Financial Reporting*

Direktur utama memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasional perusahaan berjalan dengan baik serta mengambil keputusan atas nama pemegang saham (*shareholders*). Apabila dilihat dari perspektif teori keagenan, segala keputusan yang diambil oleh direktur utama perlu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham agar terhindar dari adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang merupakan suatu bentuk masalah keagenan (*agency problem*). Oleh karena itu, pemegang saham perlu memastikan bahwa direktur utama merupakan individu yang memiliki keahlian finansial yang mumpuni, sehingga para pemegang saham percaya investasi yang telah ditanamkan pada perusahaan tidak terbuang percuma. Lebih lanjut, direktur utama yang memiliki keahlian finansial mumpuni akan lebih sensitif terhadap setiap celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku fraud yang memungkinkan terjadinya fraud dalam proses pelaporan keuangan. Selain itu, diyakini bahwa perusahaan yang dijalankan oleh individu yang kompeten cenderung menghasilkan kinerja lebih optimal dibanding perusahaan yang dijalankan oleh individu yang tidak kompeten. Keahlian finansial yang dimaksud disini merujuk pada latar belakang serta pengalaman yang dimiliki oleh direktur utama di bidang keuangan.

Direktur utama yang memiliki keahlian finansial, lebih mampu menggalang dana secara eksternal dibandingkan dengan direktur utama yang tidak memiliki keahlian finansial (Custodio & Metzger, 2014). Atau dengan kata lain, direktur utama memiliki akses yang lebih baik terhadap pasar modal. Rostami & Rezaei (2022) menemukan adanya pengaruh negatif dalam hubungan keahlian finansial CEO terhadap *fraudulent financial reporting*. Alzoubi & Selamat (2012) juga menemukan hal serupa, di mana keahlian dewan perusahaan memberi pengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Direktur utama yang memahami dengan baik kebijakan dan standar akuntansi yang berlaku, akan mengambil kebijakan dan menjalankan perusahaan dengan lebih baik dan meminimalisir potensi terjadinya *fraudulent financial reporting*. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Keahlian finansial direktur utama memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting*

Pengaruh Keahlian Finansial Dewan Komisaris terhadap Kemungkinan Terjadinya *Fraudulent Financial Reporting*

Berdasarkan perspektif teori keagenan, dewan komisaris memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja direksi guna memastikan bahwa tidak akan timbul benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara manajemen dan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Mengingat pentingnya peran ini, pemegang saham perlu memastikan bahwa anggota dewan komisaris merupakan individu yang memiliki keahlian finansial yang mumpuni, sehingga para pemegang saham percaya investasi yang telah ditanamkan pada perusahaan tidak terbuang percuma. Lebih lanjut, dewan komisaris yang memiliki keahlian finansial mumpuni akan lebih sensitif dalam menilai segala keputusan yang diambil oleh direksi, apakah keputusan tersebut bersifat oportunistik yang dapat merugikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait atau tidak. Selain itu, diyakini bahwa perusahaan yang diawasi oleh individu yang kompeten cenderung menghasilkan kinerja lebih optimal dibanding perusahaan yang diawasi oleh individu yang tidak kompeten. Keahlian finansial yang dimaksud disini merujuk pada latar belakang serta pengalaman yang dimiliki oleh dewan komisaris di bidang keuangan.

Dewan komisaris yang memiliki keahlian finansial, lebih mampu mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan dibandingkan dengan dewan komisaris yang tidak memiliki keahlian finansial (Custodio & Metzger, 2014). Rostami & Rezaei (2022) menemukan adanya pengaruh negatif dalam hubungan keahlian finansial dewan perusahaan terhadap *fraudulent financial reporting*. Alzoubi & Selamat (2012) juga menemukan hal serupa, di mana keahlian dewan perusahaan memberi pengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Dewan komisaris yang memahami dengan baik kebijakan dan standar akuntansi yang berlaku, akan memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap proses pengungkapan informasi keuangan perusahaan dan meminimalisir potensi terjadinya *fraudulent financial reporting*. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Keahlian finansial dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting*

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Kemungkinan Terjadinya *Fraudulent Financial Reporting*

Antara dewan komisaris dan direksi perlu mengadakan rapat pertemuan guna membahas perkembangan perusahaan yang perlu menjadi perhatian agar tujuan jangka panjang perusahaan dapat tercapai serta mendiskusikan potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat terjadi (KNKG, 2021). Apabila terindikasi bahwa terdapat suatu perilaku oportunistik yang dilakukan oleh direksi maupun lini manajemen lainnya, maka para anggota dewan komisaris akan membahasnya pada rapat tersebut sebagai bentuk respon atas fungsi pengawasan yang dilakukan dewan komisaris. Dapat dikatakan bahwa rapat dewan ini menjadi alat komunikasi antar anggota dewan komisaris dan direksi. Bapepam-LK (2010) turut menegaskan bahwa emiten dan perusahaan publik berkewajiban untuk mengungkapkan terkait jumlah pertemuan yang diadakan oleh direksi maupun dewan komisaris serta jumlah kehadiran tiap-tiap anggota sehubungan dengan implementasi tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan.

Rostami & Rezaei (2022) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh negatif atas frekuensi rapat dewan perusahaan terhadap *fraudulent financial reporting*. Artinya semakin besar frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh dewan komisaris, semakin banyak pula informasi terkait perkembangan perusahaan yang diterima. Selain itu, jumlah rapat yang diadakan menunjukkan keseriusan dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas kualitas informasi yang termuat dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini tentu saja dapat meminimalisir terjadinya *fraudulent financial reporting*, karena jika terdapat suatu indikasi berkaitan dengan kualitas informasi yang disajikan akan langsung ditindaklanjuti oleh dewan komisaris. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Frekuensi rapat dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting*

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kemungkinan Terjadinya *Fraudulent Financial Reporting*

Menurut Jensen & Meckling (1976), dalam suatu hubungan keagenan antara agen dan prinsipal, masing-masing dari mereka memiliki kepentingannya sendiri. Hal tersebut akan menimbulkan suatu masalah keagenan (*agency problem*) apabila terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*). Oleh karena itu diperlukan suatu penyelaras kepentingan seperti kepemilikan manajerial. Ketika manajer memiliki sejumlah saham perusahaan, maka hal tersebut merujuk pada kepemilikan manajerial. Kepemilikan seperti ini mampu menyelaraskan kepentingan manajer selaku agen serta sebagai prinsipal yang dalam hal ini ialah pemegang saham. Dengan meningkatkan besaran kepemilikan saham yang dipegang pihak manajemen, biaya keagenan (*agency cost*) yang mungkin timbul dapat diminimalisir besarnya (Jensen & Meckling, 1976). Dwiputri (2013) dalam penelitiannya juga menambahkan bahwa perilaku oportunistik manajemen dapat dibatasi melalui tingkat kepemilikan saham yang semakin tinggi, sehingga *fraudulent financial reporting* dapat dicegah.

Temuan Rostami & Rezaei (2022) menyatakan *fraudulent financial reporting* secara negatif dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial. Senada dengan Rostami & Rezaei, Chen dkk. (2014) juga menemukan adanya hubungan negatif antara kepemilikan manajerial terhadap kemungkinan *fraudulent financial reporting*. Peningkatan kepemilikan saham manajemen dalam hal ini yakni direksi serta dewan komisaris, akan mengurangi motivasi manajemen dalam mengambil keputusan yang semata-mata menguntungkan pihak manajemen dengan mengabaikan kepentingan pemegang saham. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H6 : Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting*

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Perusahaan sektor keuangan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020 hingga tahun 2022 menjadi populasi dalam penelitian ini. Merujuk pada Survei Fraud Indonesia (ACFE Indonesia, 2019), industri keuangan menjadi industri yang paling dirugikan atas kasus fraud laporan keuangan yang terjadi di Indonesia sebesar 41,4%. Berdasarkan data pada laporan yang diterbitkan oleh RSM Indonesia tahun 2020 yang berjudul “Implikasi Pandemi terhadap Risiko Fraud” menunjukkan bahwa selama masa pandemi, kasus fraud yang terjadi di dalam suatu entitas mengalami peningkatan sebesar 80%, sehingga periode 2020 hingga 2022 terpilih menjadi tahun observasi. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, pemilihan sampel didasarkan atas kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Perusahaan tidak *delisting* dari Bursa Efek Indonesia maupun berganti sektor industri selama periode observasi
3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan maupun laporan tahunan (*annual report*) yang dipublikasi melalui laman resmi milik perusahaan maupun laman Bursa Efek Indonesia selama periode observasi
4. Laporan keuangan yang diterbitkan menggunakan mata uang Rupiah (Rp) selama periode observasi
5. Perusahaan mengungkapkan data maupun informasi yang relevan untuk kepentingan penelitian

Model dan Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisa regresi logistik guna menguji hipotesis yang berkembang dengan bantuan software SPSS 26. Berikut adalah model yang digunakan:

$$\text{FRAUD}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{BIND}_t + \beta_2 \text{REWARDS}_t + \beta_3 \text{FE_CEO}_t + \beta_4 \text{FE_BOARD}_t + \beta_5 \text{BEF}_t + \beta_6 \text{OWNERHIP}_t + \beta_7 \text{IC_EFFICIENCY}_t + \beta_8 \text{IS}_t + \beta_9 \text{SIZE}_t + \beta_{10} \text{LEV}_t$$

FRAUD: Fraudulent financial reporting merupakan variabel dependen yang diukur menggunakan Adj M-Score (Razali & Arshad, 2014) sebagai berikut.

$$\text{Adj-Mscore} = 0,002 + 0,061 (\text{DSRI}) - 0,032 (\text{GMI}) + 0,004 (\text{AQI}) + 0,19 (\text{SGI}) - 0,641 (\text{DEPI}) + 0,024 (\text{SGAI}) + 0,275 (\text{LVGI}) + 0,665 (\text{TATA})$$

Sedangkan untuk variabel independen, menggunakan tata kelola perusahaan yang diukur dengan berdasarkan enam indikator.

BIND: Independensi dewan komisaris, diukur dengan rasio jumlah komisaris independen terhadap jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris.

REWARDS: Remunerasi dewan komisaris, diukur dengan jumlah remunerasi dewan komisaris yang disetujui oleh RUPS tahun ditinjau.

FE_CEO: Keahlian finansial direktur utama, diukur dengan apabila direktur utama memiliki gelar di bidang akuntansi, manajemen keuangan maupun ekonomi akan diberi skor 1; apabila tidak memiliki akan diberi skor 0.

FE_BOARD: Keahlian finansial dewan komisaris, diukur dengan apabila setidaknya terdapat satu anggota dewan komisaris memiliki gelar di bidang akuntansi, manajemen keuangan maupun ekonomi akan diberi skor 1; apabila tidak memiliki akan diberi skor 0.

BEF: Frekuensi rapat dewan komisaris, diukur berdasarkan jumlah rapat yang diselenggarakan oleh dewan komisaris secara internal selama tahun ditinjau.

OWNERSHIP: Kepemilikan manajerial, diukur dengan rasio jumlah saham yang dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris atas perusahaan terhadap jumlah total saham perusahaan.

Guna mengendalikan efek yang tidak diinginkan dalam hubungan variabel independen terhadap variabel dependen digunakan pula beberapa variabel kontrol sebagai berikut.

IC_EFFICIENCY: Efektivitas pengendalian internal, diukur dengan apabila terdapat indikasi lemahnya pengendalian internal yang dilaporkan oleh auditor akan diberi skor 1; apabila tidak akan diberi skor 0.

IS: Perataan laba, diukur dengan menggunakan *Eckel Index*. Apabila indeks perusahaan kurang dari satu maka dapat dikatakan bahwa perusahaan bersangkutan melakukan perataan laba dan akan diberi skor 1; apabila indeks perusahaan lebih dari atau sama dengan satu maka dapat dikatakan bahwa perusahaan bersangkutan tidak melakukan perataan laba dan akan diberi skor 0.

SIZE: Ukuran perusahaan, diukur dengan logaritma atas total aset perusahaan.

LEV: Leverage, diukur dengan rasio total liabilitas terhadap total aset yang dimiliki perusahaan tahun ditinjau.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Perusahaan sektor keuangan terdaftar pada BEI dari tahun 2020 hingga 2022 menjadi populasi pada studi ini. Berdasarkan populasi tersebut, ditentukan sejumlah sampel yang selanjutnya akan dipergunakan dalam studi ini melalui penggunaan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, terpilih sejumlah 87 perusahaan sektor keuangan yang dijadikan objek pada studi ini dengan total sampel sejumlah 261 sampel.

Tabel 1
Perincian Sampel Penelitian

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	100
2.	Perusahaan yang <i>delisting</i> dari Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun berganti sektor industri selama periode observasi	(8)
3.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan maupun laporan tahunan (<i>annual report</i>) pada laman resmi milik perusahaan maupun laman Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode observasi	(3)
4.	Laporan keuangan yang tidak diterbitkan menggunakan mata uang Rupiah (Rp) selama periode observasi	(0)
5.	Perusahaan yang tidak mengungkapkan data maupun informasi yang relevan untuk kepentingan penelitian	(2)
Jumlah perusahaan sektor keuangan yang memenuhi kriteria		87
Jumlah sampel penelitian (87 x 3 tahun)		261

Sumber: Laman resmi Bursa Efek Indonesia, diolah

Statistik Deskriptif

Nilai minimum, rata-rata, maksimum, serta standar deviasi akan memberikan gambaran data melalui statistik deskriptif (Ghozali, 2018). Adapun hasil statistik deskriptif dari tiap-tiap variabel tersaji pada tabel 2 dan tabel 3 berikut.

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Kuantitatif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BIND	261	0,2000	1,0000	0,5352	0,1324
REWARD	261	18,5000	25,9200	22,2355	1,4469
BEF	261	2,0000	62,0000	10,5977	10,0217
OWNERSHIP	261	0,0000	0,3787	0,0073	0,0310
SIZE	261	24,0700	35,2300	29,9362	2,3264
LEV	261	0,0100	798,2700	3,6746	49,3741
Valid N (listwise)	261				

Sumber: Output IBM SPSS 26, diolah (2023)

Tabel 3
Statistik Deskriptif Variabel Kualitatif

	N	Banyaknya Angka 0	Banyaknya Angka 1	Persentase Angka 0	Persentase Angka 1
FRAUD	261	242	19	92,72%	7,28%
FE_CEO	261	84	177	32,18%	67,82%
FE_BOARD	261	17	244	6,51%	93,49%
IC_EFFICIENCY	261	245	16	93,87%	6,13%

IS	261	74	187	28,35%	71,65%
Valid N (listwise)	261				

Sumber: Data sekunder, diolah (2023)

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terlihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* seperti yang ditampilkan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

	Tolerance	VIF
BIND	0,925	1,081
REWARD	0,774	1,292
FE_CEO	0,968	1,033
FE_BOARD	0,991	1,009
BEF	0,779	1,284
OWNERSHIP	0,921	1,086

Sumber: Output IBM SPSS 26, diolah (2023)

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas terhadap 6 variabel independen, nilai VIF tiap-tiap variabel bernilai ≤ 10 serta nilai *Tolerance* dari tiap-tiap variabel bernilai $\geq 0,10$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi yang terbentuk.

Uji Keseluruhan Model (*Overall Fit Test*)

Tabel 5
Uji Keseluruhan Model

	-2 Log Likelihood	Coefficients Constant
Step 0	136,145	-2,544
Step 1	122,167	0,127

Sumber: Output IBM SPSS 26, diolah (2023)

Hasil pengujian keseluruhan model berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan ketika hanya konstanta (*Step 0*) yang dimasukkan kedalam model diperoleh nilai *-2 Log Likelihood* sebesar 136,145. Sementara ketika menambahkan koefisien dari variabel bebas serta variabel kontrol (*Step 1*) kedalam model akan diperoleh nilai *-2 Log Likelihood* sebesar 122,167. Dikarenakan terdapat penurunan nilai *-2 Log Likelihood*, dapat dikatakan model telah fit dengan data.

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)

Hosmer & Lemeshow's Goodness of Fit Test digunakan dalam menguji kelayakan model berdasarkan nilai *chi-square*. Penggunaan nilai statistik *chi-square* ini ditujukan untuk memperoleh bukti empiris terkait kesesuaian data penelitian dengan model regresi yang terbentuk.

Tabel 6
Uji Kelayakan Model

Step	Chi-square	df	Sig.
1	9,631	8	0,292

Sumber: Output IBM SPSS 26, diolah (2023)

Hasil pengujian kelayakan model berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa dengan *degree of freedom* (df) sebesar 8 diperoleh nilai *chi-square* sebesar 9,631 yang berada pada tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,292. Tingkat signifikansi (Sig.) hasil pengujian tersebut bernilai $> 0,05$ yang dapat diartikan bahwa model dapat mengestimasi nilai observasi data.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi menjadi salah satu bentuk pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah model mampu mendeskripsikan variabel dependen dalam rentang nilai koefisien

determinasi antara 0 dan 1 (Ghozali, 2018). *Cox & Snell's R Square* yang dimodifikasi menjadi *Nagelkerke's R Square* digunakan untuk menilai koefisien determinasi.

Tabel 7
Uji Koefisien Determinasi

Step	-2 Log Likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	122,167	0,052	0,128

Sumber: Output IBM SPSS 26, diolah (2023)

Hasil pengujian koefisien determinasi berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai *Nagelkerke's R Square* sebesar 0,128 dan nilai *Cox & Snell's R Square* sebesar 0,052. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa variabilitas *fraudulent financial reporting* yang mampu dijelaskan oleh variabilitas remunerasi dewan komisaris, keahlian finansial direktur utama, independensi dewan komisaris, keahlian finansial dewan komisaris, kepemilikan manajerial, serta frekuensi rapat dewan komisaris ialah sebesar 12,8%. Sementara sisanya yang sebesar 87,2% dijelaskan oleh berbagai faktor lain di luar model penelitian.

Uji Hipotesis

Hipotesis yang telah dikembangkan sebelumnya akan diuji kebenarannya dengan menggunakan metode regresi logistik untuk menilai kemampuan remunerasi dewan komisaris, keahlian finansial direktur utama, independensi dewan komisaris, keahlian finansial dewan komisaris, kepemilikan manajerial, serta frekuensi rapat dewan komisaris dalam memprediksi probabilitas terjadinya *fraudulent financial reporting*. Adapun hasil dari pengujian hipotesis menggunakan model regresi logistik tersaji pada tabel 8 berikut.

Tabel 8
Hasil Analisa Regresi Logistik

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
BIND	1,477	2,052	0,518	1	0,472	0,228
REWARD	-0,071	0,234	0,093	1	0,761	0,931
FE_CEO	0,706	0,629	1,258	1	0,262	2,025
FE_BOARD	-1,232	0,764	2,599	1	0,107	0,292
BEF*	-0,163	0,087	3,532	1	0,060	0,850
OWNERSHIP	-3,347	10,197	0,108	1	0,743	0,035
IC_EFFICIENCY	0,246	0,850	0,083	1	0,773	1,278
IS	0,450	0,610	0,543	1	0,461	1,568
SIZE	0,058	0,173	0,113	1	0,737	1,060
LEV	-0,930	1,148	0,657	1	0,418	0,395
Constant	0,127	5,502	0,001	1	0,982	1,135

*Signifikan pada 0,1

Sumber: Output IBM SPSS 26, diolah (2023)

Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Kemungkinan Terjadinya *Fraudulent Financial Reporting*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan model regresi logistik, diperoleh koefisien B yang bernilai positif sebesar 1,477 dengan signifikansi sebesar $0,472 > 0,1$. Hasil tersebut mengimplikasikan bahwa kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting* justru tidak terpengaruh oleh independensi dewan komisaris. Artinya komisaris independen yang diangkat oleh perusahaan hanya semata-mata bertujuan untuk mematuhi regulasi yang ada, bukan ditujukan untuk menegakkan praktik tata kelola perusahaan guna menekan probabilitas terjadinya *fraudulent financial reporting*. Dengan demikian H1 ditolak karena temuan ini bertolak belakang dengan hipotesis awal yang menduga probabilitas terjadinya *fraudulent financial reporting* dapat diturunkan melalui peningkatan independensi dewan komisaris.

Hasil penelitian ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Wisely & Karina (2022), di mana pengaruh terhadap kemungkinan perusahaan melakukan manipulasi dalam laporan keuangannya tidak signifikan dengan keberadaan komisaris independen dalam susunan anggota

dewan komisaris. Menurut Andriana & Panggabean (dikutip oleh Wisely & Karina, 2022), hal ini dikarenakan komisaris independen diangkat oleh perusahaan hanya semata-mata bertujuan untuk mematuhi aturan yang berlaku, sehingga perusahaan tidak berfokus pada pelaksanaan tata kelola perusahaan. Keberadaan komisaris independen dalam susunan anggota dewan komisaris sejatinya berperan penting dalam mengawasi kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan agar tidak timbul konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang merupakan salah satu bentuk masalah keagenan (*agency problem*). Apabila semakin banyak perusahaan yang memiliki pandangan serupa, maka kemungkinan melemahnya pelaksanaan tata kelola perusahaan semakin besar dan berimbas kepada maraknya tindakan *fraudulent financial reporting* yang mungkin terjadi.

Pengaruh Remunerasi Dewan Komisaris terhadap Kemungkinan Terjadinya *Fraudulent Financial Reporting*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan model regresi logistik, diperoleh koefisien B yang bernilai negatif sebesar 0,071 dengan signifikansi sebesar $0,761 > 0,1$. Hasil tersebut mengimplikasikan bahwa kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting* justru tidak terpengaruh oleh remunerasi dewan komisaris. Artinya remunerasi yang diberikan kepada dewan komisaris tidak cukup efektif untuk meningkatkan kinerja anggota dewan komisaris, atau bahkan remunerasi yang diberikan dapat memotivasi dewan komisaris terlibat dalam tindakan *fraudulent financial reporting* yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hal ini bertentangan dengan hipotesis awal yang menduga semakin banyak jumlah remunerasi yang diterima oleh dewan komisaris akan menurunkan probabilitas terjadinya *fraudulent financial reporting*, dengan demikian H2 ditolak.

Remunerasi menjadi salah satu bentuk insentif kepada anggota dewan komisaris guna menekan biaya keagenan (*agency cost*) yang mungkin timbul. Ketika anggota dewan komisaris menerima remunerasi dengan jumlah tertentu, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan. Namun demikian, apabila dilihat melalui perspektif teori segitiga fraud (*fraud triangle theory*), pemberian remunerasi ini juga menjadi salah satu faktor yang dapat memotivasi anggota dewan komisaris memuluskan praktik *fraudulent financial reporting*. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil yang diperoleh Rostami & Rezaei (2022), di mana kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting* tidak terpengaruh secara signifikan oleh remunerasi.

Pengaruh Keahlian Finansial Direktur Utama terhadap Kemungkinan Terjadinya *Fraudulent Financial Reporting*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan model regresi logistik, diperoleh koefisien B yang bernilai positif sebesar 0,706 dengan signifikansi sebesar $0,262 > 0,1$. Hasil tersebut mengimplikasikan bahwa kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting* justru tidak terpengaruh oleh keahlian finansial direktur utama. Artinya jika direktur utama perusahaan memiliki gelar akademis di bidang akuntansi, manajemen, dan sebagainya yang relevan, tidak begitu penting dalam upaya menekan probabilitas terjadinya *fraudulent financial reporting*. Dengan demikian H3 ditolak karena temuan ini bertolak belakang dengan hipotesis awal yang menduga jika direktur utama perusahaan memiliki keahlian finansial akan menurunkan probabilitas terjadinya *fraudulent financial reporting*.

Dalam perspektif teori keagenan, direktur utama berperan sebagai agen yang ditugaskan oleh prinsipal atau dalam hal ini ialah pemegang saham untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan sebaik mungkin. Agar perusahaan dapat dijalankan dengan baik, maka dalam pengangkatan direktur utama memperhatikan aspek keahlian yang dimiliki. Terlebih wewenang atas pengambilan keputusan strategis perusahaan dikuasai oleh direktur utama. Namun demikian, direktur utama dengan latar belakang pendidikan yang kurang mumpuni juga dapat menjalankan suatu perusahaan (Firdaus & Suryandari, 2008). Bukti empiris yang diperoleh selaras dengan temuan Kusumosari (2020) yang menyebutkan bahwa fraud laporan keuangan tidak terpengaruh secara signifikan oleh pendidikan direktur utama.

Pengaruh Keahlian Finansial Dewan Komisaris terhadap Kemungkinan Terjadinya *Fraudulent Financial Reporting*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan model regresi logistik, diperoleh koefisien B yang bernilai negatif sebesar 1,232 dengan signifikansi sebesar $0,107 > 0,1$. Hasil tersebut mengimplikasikan bahwa kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting* justru tidak terpengaruh oleh keahlian finansial dewan komisaris. Artinya jika terdapat anggota dewan komisaris yang memiliki gelar akademis di bidang akuntansi, manajemen, dan sebagainya yang relevan, tidak begitu penting dalam upaya menekan probabilitas terjadinya *fraudulent financial reporting*. Dengan demikian H4 ditolak karena temuan ini bertolak belakang dengan hipotesis awal yang menduga jika setidaknya terdapat satu anggota dewan komisaris memiliki keahlian finansial akan menurunkan probabilitas terjadinya *fraudulent financial reporting*.

Dalam perspektif teori keagenan, dewan komisaris berperan sebagai agen yang ditugaskan oleh prinsipal atau dalam hal ini ialah pemegang saham untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan sumber daya perusahaan dengan sebaik mungkin. Agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dapat dilakukan secara optimal, maka dalam pengangkatan anggota dewan komisaris perlu memperhatikan aspek keahlian yang dimiliki. Namun begitu, menurut Scott (2020), fraud dapat terjadi karena manajemen perusahaan dengan leluasa menentukan kebijakan. Hal seperti itu dapat menurunkan peranan dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan perusahaan dan berujung pada meningkatnya kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting*. Bukti empiris yang diperoleh selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Wisely & Karina (2022), di mana keahlian finansial dewan komisaris tidak memberikan pengaruh terhadap tindakan manajemen laba.

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Kemungkinan Terjadinya *Fraudulent Financial Reporting*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan model regresi logistik, diperoleh koefisien B yang bernilai negatif sebesar 0,163 dengan signifikansi sebesar $0,060 < 0,1$. Hasil tersebut mengimplikasikan bahwa kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting* secara negatif dipengaruhi oleh frekuensi rapat yang diadakan oleh dewan komisaris. Artinya jika semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, akan menurunkan probabilitas terjadinya *fraudulent financial reporting*. Dengan demikian H5 diterima karena temuan ini senada dengan hipotesis awal yang menduga semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat akan menurunkan probabilitas terjadinya *fraudulent financial reporting*.

Hasil penelitian ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Rostami & Rezaei (2022), di mana kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting* secara negatif dipengaruhi oleh frekuensi rapat dewan komisaris. Jumlah rapat yang diadakan oleh dewan komisaris secara internal, mencerminkan kesadaran dewan komisaris akan aktivitas perusahaan serta sebagai bentuk pengawasan atas kualitas laporan keuangan termasuk informasi yang termuat di dalamnya. Semakin besar frekuensi rapat internal yang dilaksanakan oleh dewan komisaris menunjukkan bahwa terdapat masalah krusial yang terjadi berkaitan dengan perusahaan. Namun di sisi lain, makin banyak pula informasi terkait perkembangan perusahaan yang diterima dan masalah keagenan (*agency problem*) yang timbul dapat segera diatasi dengan makin seringnya dewan komisaris melakukan pertemuan.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kemungkinan Terjadinya *Fraudulent Financial Reporting*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan model regresi logistik, diperoleh koefisien B yang bernilai negatif sebesar 3,347 dengan signifikansi sebesar $0,743 > 0,1$. Hasil tersebut mengimplikasikan bahwa kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting* tidak terpengaruh oleh kepemilikan manajerial. Artinya besar kecilnya kepemilikan saham manajemen tidak mempengaruhi terjadinya *fraudulent financial reporting*. Dengan demikian H6 ditolak karena temuan ini bertentangan dengan hipotesis awal yang menduga probabilitas terjadinya *fraudulent financial reporting* dapat ditekan dengan semakin besar persentase kepemilikan saham manajemen.

Melalui perspektif teori keagenan, biaya keagenan (*agency cost*) yang mungkin timbul dapat diminimalisir besarnya dengan meningkatkan persentase kepemilikan saham manajemen, karena hal tersebut akan menciptakan keselarasan antara kepentingan manajemen selaku agen serta prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Ketika manajemen juga berperan sebagai prinsipal, maka

segala keputusan yang diambil akan dipertimbangkan sebaik mungkin serta dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya akan lebih optimal dan berujung pada penurunan probabilitas terjadinya *fraudulent financial reporting*. Temuan penelitian ini selaras dengan temuan Aprilia (2017) yang menunjukkan hasil yang sebaliknya di mana fraud laporan keuangan tidak terpengaruh oleh kepemilikan manajerial.

KESIMPULAN

Penelitian dengan objek perusahaan sektor keuangan terdaftar di BEI periode 2020 s.d. 2022 ini berfokus pada pengujian tata kelola perusahaan yang diprosikan dengan menggunakan independensi dewan komisaris, remunerasi dewan komisaris, keahlian finansial direktur utama, keahlian finansial dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, serta kepemilikan manajerial guna melihat probabilitas keterjadian *fraudulent financial reporting*. Berdasarkan bukti empiris yang diperoleh, kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting* justru tidak terpengaruh secara signifikan oleh independensi dewan komisaris, remunerasi dewan komisaris, keahlian finansial direktur utama, keahlian finansial dewan komisaris, dan kepemilikan manajerial. Sementara untuk frekuensi rapat dewan komisaris memberikan pengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting*.

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu menjadi perhatian, dimana berdasarkan bukti empiris yang diperoleh, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan probabilitas keterjadian *fraudulent financial reporting* hanya sebesar 12,8%, sementara 87,2% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian. Periode penelitian tahun 2020 hingga 2022 atau selama masa pandemi *Covid-19* menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi hasil penelitian, sehingga peneliti memutuskan untuk menggunakan taraf signifikansi sebesar 10% atau 0,1 yang membuat resiko kekeliruan dalam justifikasi hasil penelitian menjadi lebih besar dibandingkan dengan penggunaan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05 yang banyak digunakan oleh penelitian serupa. Selain itu, objek penelitian perusahaan sektor keuangan yang menawarkan jasa dalam operasionalnya, dapat memunculkan bias dalam menentukan komponen COG (*cost of goods*) dalam menghitung GMI (*gross margin index*) guna mengetahui nilai M-Score bila dibandingkan dengan penentuan komponen COG pada perusahaan yang menawarkan *consumer goods*. Merujuk pada hasil analisa serta keterbatasan yang dijumpai, pada penelitian berikutnya mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi probabilitas terjadinya *fraudulent financial reporting* seperti periode penelitian yang digunakan. Selain itu, pada penelitian berikutnya dapat memodifikasi variabel independen yang digunakan pada penelitian ini dengan atribut tata kelola perusahaan (*corporate governance*) lainnya seperti peranan komite-komite dalam perusahaan guna menilai probabilitas terjadinya *fraudulent financial reporting* dari perspektif yang berbeda.

REFERENSI

- ACFE Indonesia Chapter. (2020). *Survei Fraud Indonesia 2019*.
- AICPA. (2002). *Statement on Auditing Standards (SAS) No.99*.
- Alijoyo, A., & Zaini, S. (2004). *Komisaris Independen: Pengerak Praktik GCG di Perusahaan* (1st ed.). PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Alzoubi, E. S. S., & Selamat, M. H. (2012). The Effectiveness of Corporate Governance Mechanisms on Constraining Earning Management: Literature Review and Proposed Framework. *International Journal of Global Business*, 5(1), 17–35.
- Aprilia. (2017). Analisis Pengaruh Fraud Pentagon terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish Model pada Perusahaan yang Menerapkan Asean Corporate Governance Scorecard. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9(1), 101–132.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2022). *Occupational Fraud 2022: A Report to The Nation*.
- Chen, J. J., & Zhang, H. (2014). The Impact of the Corporate Governance Code on Earnings Management - Evidence from Chinese Listed Companies. *European Financial Management*, 20(3), 596–632. <https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2012.00648.x>
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: The Social Psychology of Embezzlement*. The Free

Press.

- Custódio, C., & Metzger, D. (2014). Financial expert CEOs: CEO's work experience and firm's financial policies. *Journal of Financial Economics*, 114(1), 125–154. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.06.002>
- Firdaus, E.F., & Suryandari, E. (2008). Pengaruh Faktor-Faktor Organisasi, Manajemen Strategi, Keuangan, Auditor dan Pemerintahan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Journal Akuntansi dan Investigasi*, 9 (2), 173-188.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (2010). *Accounting Theory* (7th ed.). John Wiley & Sons.
- Institut Akuntan Indonesia. (2019). *PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Komite Nasional Kebijakan Governansi. (2021). *Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021*.
- Kusumosari, L. (2020). *ANALISIS KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN MELALUI FRAUD HEXAGON PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2018*. Under Graduates thesis, Unnes.
- Razali, W. A. A. W. M., & Arshad, R. (2014). Disclosure of Corporate Governance Structure and the Likelihood of Fraudulent Financial Reporting. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 145, 243–253. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.032>
- Rostami, V., & Rezaei, L. (2022). Corporate governance and fraudulent financial reporting. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 1009–1026. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0160>
- RSM Indonesia. (2020). *Implication on Pandemic in Fraud Risk*.
- Wisely, N. A., & Karina, R. (2022). ANALISIS PENGARUH KUALITAS PENGUNGKAPAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA . *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 209-226. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v5i2.252>